

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan Negara yang berasal dari rakyat. Dengan adanya pembayaran pajak maka pemerintah dapat melakukan program-program pembangunan yang dapat dinikmati rakyat. Namun bagi masyarakat, pajak merupakan beban karena mengurangi penghasilan mereka, terlebih lagi tidak mendapatkan imbalan langsung ketika membayar pajak. Hal inilah yang menyebabkan banyak dari masyarakat bahkan perusahaan yang melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah salah satu cara untuk menghindari pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan. Penghindaran pajak ini dapat dikatakan persoalan yang rumit dan unik karena disatu sisi diperbolehkan, tetapi tidak diinginkan.

Kebanyakan wajib pajak badan (perseroan) masih mengidentikkan kewajiban membayar pajak sebagai suatu biaya karena secara finansial, pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor bisnis atau dunia usaha kepada sektor publik atau pemerintah yang mengakibatkan berkurangnya daya beli wajib pajak (Santoso dan Ning, 2013:1). Bagi para manajemen perusahaan yang secara umum tidak menginginkan berkurangnya daya beli akan berusaha meminimalkan biaya melalui efisiensi biaya untuk mengoptimalkan laba perusahaan, dalam hal ini adalah termasuk pembayaran

pajak. Secara umum tindakan penghindaran pajak dianggap sebagai tindakan yang legal karena lebih banyak memanfaatkan *loopholes* yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku (*lawfull*) (Santoso dan Ning, 2013:2). Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi suatu perusahaan dalam melakukan kewajiban perpajakannya, antara lain *corporate social responsibility* dan struktur kepemilikan.

Pada dasarnya perusahaan dituntut untuk mampu bertanggung jawab atas seluruh aktivitasnya terhadap para stakeholder. *Corporate Social Responsibility (CSR)* merupakan suatu bentuk komitmen bisnis untuk bertindak secara etis, berkontribusi pada pembangunan ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup pekerja dan masyarakat pada umumnya (Holme dan Watts, 2006 dalam Lanis dan Richardson, 2012). Di Indonesia CSR merupakan sesuatu hal yang *voluntary* atau tidak wajib dilakukan oleh perusahaan. Namun bagi beberapa perusahaan yang beroperasi di Indonesia CSR merupakan sebuah hal yang *mandatory* atau wajib dilakukan. Di Indonesia undang-undang mengenai pengungkapan CSR telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No 47 (2012) tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Watson (2011) menyatakan bahwa perusahaan yang mempunyai peringkat rendah dalam CSR dianggap sebagai perusahaan yang tidak bertanggung jawab secara sosial sehingga dapat melakukan strategi pajak dibandingkan perusahaan yang sadar sosial. Oleh karena itu, apabila pengungkapan CSR tinggi maka manajer perusahaan meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan untuk melakukan

pengungkapan CSR, sehingga meminimalisir terjadinya praktik penghindaran pajak. Selain CSR, dalam penelitian ini juga menggunakan proksi struktur kepemilikan. Proksi struktur kepemilikan yang digunakan adalah struktur kepemilikan keluarga, kepemilikan asing, kepemilikan terkonsentrasi, dan kepemilikan institusional.

Struktur kepemilikan keluarga merupakan kepemilikan yang memiliki proporsi saham yang dimiliki oleh para keluarga lebih dari 5%. Dampak adanya risiko seringkali menjadi alasan bagi perusahaan yang terkonsentrasi kepemilikannya hanya pada sejumlah kecil investor untuk tidak melakukan tindakan *tax avoidance*, hal ini sejalan dengan temuan dari Badertscher et.al (2013) yang menunjukkan bahwa biaya marjinal penghindaran pajak dan pemisahan kepemilikan dan kontrol keduanya mempengaruhi praktek pajak perusahaan. Demikian pula temuan dari Fama dan Jensen (1983) yang menyatakan bahwa ketika kepemilikan ekuitas dan pengambilan keputusan perusahaan terkonsentrasi hanya dalam sejumlah kecil pengambil keputusan, manajer pemilik kemungkinan akan lebih *risk averse* hingga kurang bersedia untuk berinvestasi dalam proyek-proyek berisiko. Demikian juga dengan temuan penelitian Chen et al.(2010) menunjukkan bahwa ternyata tingkat pajak perusahaan keluarga lebih kecil daripada perusahaan non-keluarga, hal ini diduga karena *family owners* lebih rela membayar pajak lebih tinggi, daripada harus membayar denda pajak dan menghadapi kemungkinan rusaknya reputasi perusahaan akibat audit dari fiskus pajak.

Selain kepemilikan keluarga, kepemilikan asing juga dianggap pihak yang fokus terhadap reputasi negara atau perusahaan pusatnya, ini juga yang menjadikan perusahaan multinasional (MNC) mulai mengubah perilaku mereka dalam beroperasi demi menjaga legitimasi dan reputasi perusahaan. Kepemilikan asing juga dianggap dapat mendorong perusahaan untuk menerapkan standar *corporate governance* yang lebih tinggi dan proteksi pada pemegang saham minoritas yang lebih baik (Khanna dan Palepu, 2000), sehingga diharapkan dengan adanya kepemilikan asing dalam perusahaan publik dapat mengurangi tindakan *tax avoidance*.

Struktur kepemilikan terkonsentrasi adalah perusahaan publik yang dimiliki sebagian besar oleh pihak tertentu. Pihak tersebut dapat merupakan individu, keluarga, institusi, negara, atau asing. Menurut Chen et al (2010) kepemilikan terkonsentrasi contohnya pemegang saham yang terkonsentrasi pada sebuah keluarga cenderung tidak melakukan penghindaran pajak, karena pemilik menghindari resiko denda, sanksi, dan rusaknya reputasi perusahaan. Hak suara pemegang saham tunggal diatas 50% membuat pemegang saham ini secara efektif mengendalikan manajemen perusahaan. Pemegang saham mayoritas mempunyai hak suara untuk mempengaruhi manajer agar bertindak selaras dengan kepentingan pemegang saham, karena bila tidak pemegang saham pengendali dapat mengganti manajer bila manajer tersebut tidak mengikuti kehendaknya. Hak suara mayoritas juga dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas monitoring melalui pendisiplinan manajemen, karena dengan kepemilikan yang besar akan menjadikan pemegang saham

memiliki akses informasional yang dimiliki manajemen. Jika dapat diwujudkan maka tindakan *tax avoidance* dapat diminimalisir.

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi yang umumnya bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan (Jaya, 2014). Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemerintah, perusahaan asuransi, investor luar negeri atau bank (Dewi dan Jati, 2014). Karena adanya tanggung jawab perusahaan kepada pemegang saham, maka pemilik institusional memiliki insentif untuk memastikan bahwa manajemen perusahaan membuat keputusan yang akan memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham. Pada pengungkapan suka rela menemukan bahwa perusahaan dengan kepemilikan institusional yang lebih besar lebih memungkinkan untuk mengeluarkan, meramalkan dan memperkirakan sesuatu lebih spesifik, akurat dan optimis (Khurana, 2009). Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen karena adanya kepemilikan institusional akan meningkatkan pengawasan yang lebih optimal karena dianggap mampu memonitor setiap keputusan yang diambil oleh para manajer secara efektif. Dengan tingginya tingkat kepemilikan institusional, maka semakin besar tingkat pengawasan ke manajer dan dapat mengurangi konflik kepentingan antara manajemen sehingga masalah keagenan menjadi berkurang dan mengurangi peluang terjadinya penghindaran pajak.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“PENGARUH PENGUNGKAPAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* DAN STRUKTUR KEPEMILIKAN TERHADAP PRAKTIK PENGHINDARAN PAJAK”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap praktik penghindaran pajak?
2. Bagaimanakah pengaruh strukur kepemilikan keluarga terhadap praktik penghindaran pajak?
3. Bagaimanakah pengaruh strukur kepemilikan asing terhadap praktik penghindaran pajak?
4. Bagaimanakah pengaruh strukur kepemilikan terkonsentrasi terhadap praktik penghindaran pajak?
5. Bagaimanakah pengaruh strukur kepemilikan institusional terhadap praktik penghindaran pajak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap praktik penghindaran pajak.

2. Mengetahui pengaruh struktur kepemilikan keluarga terhadap praktik penghindaran pajak.
3. Mengetahui pengaruh struktur kepemilikan asing terhadap praktik penghindaran pajak.
4. Mengetahui pengaruh struktur kepemilikan terkonsentrasi terhadap praktik penghindaran pajak.
5. Mengetahui pengaruh struktur kepemilikan institusional terhadap praktik penghindaran pajak.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, makadiharapkan manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritik

Bagi akademik, dari penelitian ini diharapkan bermanfaat menambah referensi terhadap kajian praktik penghindaran pajak dan sebagai bahan acuan dan referensi pada penelitian sejenis yang dilakukan dimasa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi investor

Bermanfaat sebagai bahan pertimbangan untuk mengevaluasi tanggung jawab sosial suatu perusahaan yang dapat mempengaruhi *sustainability* dan citra perusahaan

b. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Penelitian ini menyediakan wawasan penting bagi para pembuat kebijakan pajak yang berusaha untuk mengidentifikasi keadaan dimana praktik penghindaran pajak lebih tinggi.

c. Bagi Perusahaan

Menambah informasi penting terkait pentingnya *corporate social responsibility* dan struktur kepemilikan akan memberikan dampak yang tidak hanya pada kinerja perusahaan saja, tetapi juga sikap terkait pajak.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran peneliti yang lebih jelas dan sistematis. Sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang tinjauan pustaka yang digunakan sebagai dasar untuk membahas permasalahan yang akan diteliti yaitu meliputi teori tentang *corporate social responsibility*, struktur kepemilikan dan praktik penghindaran pajak beserta

pengembangan hipotesis, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, data dan sumber data, definisi operasional variabel dan pengukurannya dan metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi uraian mengenai deskripsi data penelitian, deskripsi hasil penelitian, hasil pengujian asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, hasil pengujian hipotesis dan pembahasan hasil pengujian hipotesis dan pembahasan hasil pengujian terhadap jawaban ditolak atau diterimanya hipotesis yang dibuat sebelumnya.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian serta memuat saran-saran untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN